

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Laporan Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bab IV Pasal 12, adalah Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sebagai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara periodik disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini gambaran mengenai akuntabilitas dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016, meliputi penjelasan mengenai perencanaan Strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Adapun Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, dan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Rumus yang digunakan untuk analisis akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\begin{array}{c} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

Rumus 2:

$$\begin{array}{c} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan: Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Untuk memberikan makna atas persentase pencapaian kinerja ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Diatas 100 % dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Diatas 80 % s/d 100 % dengan sebutan baik (B)
- 3) Diatas 55 % s/d 80 % dengan sebutan cukup (C)
- 4) Dibawah 55 % dengan sebutan kurang (K)

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan pengukuran hasil realisasi indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1.	Peningkatan Kapasitas KUMKM	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	16.478	16.542
		Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)	267	224
2.	Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM	Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%)	5	5
		Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)	5	5
3.	Terbukanya Akses Pembiayaan Bagi KUMKM	Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)	8	6,4
		Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)	21	19,7
4.	Meningkatnya Minat Wirausaha	Jumlah Wirausaha Baru	3.300	3.300
5.	Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru	Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha	100	100

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 6. Pada tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka dilakukan perubahan indikator kinerja.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Strategi	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Indikator	Target	Capaian	Indikator	Target	Capaian
1.	Peningkatan Kapasitas KUMKM	Jumlah Koperasi Aktif (Kop)	16.078	16.855	Jumlah Koperasi Aktif (kop)	16.478	16.542
		Jumlah UMKM yang telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)	224	224	Jumlah UMKM yang telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)	267	267
2.	Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM	Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%)	5	5	Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%)	5	5
		Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)	5	5	Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)	5	5
3.	Terbukanya Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi (Kop)	6	6,14	Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)	8	6,4
		Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi UMKM (UMKM)	19	19,10	Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)	21	19,7
4.	Meningkatnya Minat Wirausaha	Jumlah Wirausaha Baru (Orang)	1.800	1.800	Jumlah Wirausaha Baru (Orang)	3.300	3.300
5.	Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru	Persentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (%)	100	100	Persentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha	100	100

3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja

3.1.3.1. Jumlah Koperasi Aktif

Berdasarkan data agregasi yang diperoleh dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sampai dengan bulan Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Koperasi		
		Aktif	TidakAktif	Total Koperasi
1.	Bogor	805	319	1.124
2.	Sukabumi	554	1.395	1.949
3.	Cianjur	1.052	200	1.252
4.	Bandung	959	761	1.720
5.	Bandung Barat	446	430	876
6.	Sumedang	493	101	594
7.	Garut	1.232	175	1.407
8.	Tasikmalaya	436	323	759
9.	Ciamis	292	443	735
10.	Pangandaran	53	146	199
11.	Kuningan	457	96	553
12.	Cirebon	645	77	722
13.	Majalengka	294	366	660
14.	Indramayu	326	652	978
15.	Subang	772	183	955
16.	Purwakarta	450	434	884
17.	Karawang	856	714	1.570
18.	Bekasi	777	232	1.009
19.	Kota Bogor	355	504	859
20.	Kota Sukabumi	229	133	362
21.	Kota Bandung	2.136	422	2.558
22.	Kota Cirebon	237	189	426
23.	Kota Bekasi	701	180	881
24.	Kota Depok	401	231	632
25.	Kota Cimahi	283	137	420
26.	Kota Tasikmalaya	415	171	586
27.	Kota Banjar	82	78	160
28.	Provinsi	804	299	1.103
	JUMLAH	16.542	9.391	25.933

Berdasarkan data dari Tabel 7, maka indikator kinerja untuk jumlah koperasi aktif maka :

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{16.542}{16.478} \times 100\% \\
 &= 100,39\%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**sangat baik**”.

3.1.3.2. Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)

Jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha pada tahun 2016 sebanyak 267. Maka nilai capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{267}{267} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**baik**”.

3.1.3.3. Persentase Peningkatan Omzet UMKM

Persentase peningkatan omzet UMKM binaan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 5%, maka nilai capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**baik**”.

3.1.3.4. Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)

Pertumbuhan skala usaha koperasi pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 5%, maka nilai capain kinerja adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**baik**”.

3.1.3.5. Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi

Persentase kredit yang diserap oleh koperasi pada tahun 2016 sebesar 6,4 %, maka nilai capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{6,4}{8} \times 100\% \\ &= 80\%\end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**cukup**”.

3.1.3.6. Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM

Persentase kredit yang diserap oleh UMKM pada tahun 2016 sebesar 19,7 %, maka nilai capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{19,7}{21} \times 100\% \\ &= 93,81\%\end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**cukup**”.

3.1.3.7. Jumlah Wirausaha Baru

Jumlah WUB yang dilatih pada tahun 2016 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.000 orang. Target yang tercantum didalam indikator kinerja adalah merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2015 sebanyak 1.800 orang, sehingga capaian jumlah indikator kinerja pada tahun 2016 sebanyak 3.300 orang. Nilai capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{3.800}{3.300} \times 100\% \\ &= 115,15\%\end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**sangat baik**”.

3.1.3.8. Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap wirausaha baru yang ada di Jawa Barat, maka diperoleh informasi bahwa seluruhnya pernah menjadi pelaku usaha, maka nilai capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian} &= \frac{\text{Nilai Capaian Target}}{\text{Nilai Rencana Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut termasuk pada kategori “**baik**”.

3.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Nilai capaian indikator kinerja keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Peningkatan Kapasitas KUMKM	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	100,9	Sangat Baik
		Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)	100,00	Baik
2.	Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM	Persentase Peningkatan Omzet UMKM (%)	100,00	Baik
		Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)	100,00	Baik
3.	Terbukanya Akses Pembiayaan Bagi KUMKM	Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)	80,00	Cukup
		Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)	93,81	Cukup
4.	Meningkatnya Minat Wirausaha	Jumlah Wirausaha Baru	115,15	Baik
5.	Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru	Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha	100,00	Baik
Rata-Rata			98,73	Baik

Berdasarkan data dari Tabel 8, terlihat bahwa secara keseluruhan indikator mencapai hasil yang baik. Ada 2 (dua) indikator yang menunjukkan indikator kurang, yaitu persentase kredit yang diserap oleh koperasi (80%) dan

persentase kredit yang diserap oleh UMKM (93,81%). Sedangkan indikator yang menunjukkan hasil sangat baik yaitu untuk indikator jumlah koperasi aktif dan jumlah wirausaha baru masing-masing dengan nilai 100,9% dan 115,15%. Nilai rata-rata capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar 98,73% dengan kategori “**baik**”.

Nilai capaian yang baik, memperlihatkan bahwa keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang dan Balai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Dinas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama Gubernur Jawa Barat yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, khususnya pada indikator kinerja daerah Jumlah Penerima Manfaat Kredit. Pencapaian indikator kinerja tersebut sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.

3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Dalam upaya pencapaian target-target kinerja tahun 2016 ini, telah dialokasikan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian indikator (1) yaitu Jumlah koperasi aktif, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM
 - 2) Pelatihan Teknis Substantif bagi UMKM
 - 3) Pengembangan Kelembagaan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias (YKW 23)
 - 4) Pengembangan Kelembagaan Padi Pandan Wangi (TKW 13)
 - 5) Pengembangan Kelembagaan Industri Perberasan dan Makanan (TKW 23)
 - 6) BHBCHT Pengembangan dan Peningkatan Kelambagaan dan Usaha KUMKM Tembakau

- 7) CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture Penyusunan Kajian Potensi UMKM
 - 8) CLTH Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture : Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Kawasan Ciletuh
 - 9) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM (DAK)
 - 10) Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan Bagi Pengelola Keuangan Koperasi
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
- 1) Penguatan Tata Kelola Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - 2) Pengembangan Koperasi Skala Besar
- c. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (APBN), dengan rincian kegiatan :
- (1) Pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam
2. Dalam pencapaian indikator (2) yaitu Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM), dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
- (1) Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW 22)
 - (2) Pengembangan Wirausaha Berdayasaing
 - (3) Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata (TKW 44)
 - (4) Pengembangan Industri Batik dan Rotan (TKW 23)
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :

- (1) Pengembangan Usaha KUMKM
 - (2) Pengembangan Jaringan dan Akses Pasar KUMKM
 - (3) Pameran Produk KUMKM
- c. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Perijinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Prov Jawa Barat
- 3. Dalam pencapaian indikator (3) yaitu Persentase Peningkatan Omzet UMKM, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW 22)
 - (2) Pengembangan Wirausaha Berdayasaing
 - (3) Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata (TKW 44)
 - (4) Pengembangan Industri Batik dan Rotan (TKW 23)
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Pengembangan Usaha KUMKM
 - (2) Pengembangan Jaringan dan Akses Pasar KUMKM
 - (3) Pameran Produk KUMKM
 - c. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Fasilitasi Promosi
 - (2) Fasilitasi Penguatan PLUT KUMKM
- 4. Dalam pencapaian indikator (4) yaitu Persentase Peningkatan Skala Usaha Koperasi, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Koperasi dan UMKM
- 5. Dalam pencapaian indikator (5) yaitu Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Tatakelola dan Pendampingan Modal Usaha bagi KUMKM
 - (2) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi KUMKM
- 6. Dalam pencapaian indikator (6) yaitu Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Tatakelola dan Pendampingan Modal Usaha bagi KUMKM
 - (2) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi KUMKM
- 7. Dalam pencapaian indikator (7) yaitu Jumlah Wirausaha Baru, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM
 - b. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan :
 - (1) Pelatihan bagi UMKM
- 8. Dalam pencapaian indikator (8) yaitu Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan :

- (1) Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM

- b. Program Peningkatan Daya Saing UMKM (APBN), dengan rincian kegiatan :

- (1) Bimbingan Teknis

- (2) Monitoring dan Evaluasi

Adapun program dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

- (1) Proses Perencanaan dan Koordinasi Bidang KUMKM

- b. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

- (1) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas KUMKM

- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas KUMKM

- (2) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan

- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM

- (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pelatihan

- e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- (1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Dinas KUMKM

- (2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai KUMKM

- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- (1) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD

- g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan :

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi KUMKM

- h. Program pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah

(1) Pengelolaan Keuangan Dinas KUMKM

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016, bahwa keseluruhan Program maupun kegiatan sebagaimana tersebut diatas, secara umum semuanya memiliki kontribusi yang baik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang sudah ditentukan. Namun demikian dalam jangka waktu ke depan perlu adanya perbaikan substansi pada masing-masing kegiatan tersebut, agar lebih mengarah pada upaya pencapaian target kinerjanya, termasuk dengan ketersediaan anggaran yang memadai sesuai dengan target kinerja yang harus diwujudkan. Disamping itu perlu adanya penyesuaian Program menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.6. Rencana dan Kegiatan

3.1.6.1. Kegiatan APBD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, terdiri dari 10 (sepuluh) program, yang terbagi menjadi program strategis dan program pendukung.

a. Program Strategis APBD TA. 2016, terdiri dari :

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.652.625.000,-), dengan kegiatan :
 - a) Pengembangan Usaha KUMKM
 - b) Pengembangan Jaringan dan Akses Pasar KUMKM
 - c) Pameran Produk KUMKM
 - d) Penguatan Tata Kelola Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - e) Pengembangan Koperasi Skala Besar
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.467.367.700,-), dengan kegiatan :

- a) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM
- b) Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM
- c) Pencetakkan 100 Ribu Wirausaha Baru
- d) Pelatihan Teknis Substantif bagi UMKM
- e) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Koperasi dan UMKM
- f) Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial bagi Pengelola Keuangan Koperasi
- g) Tatakelola dan Pendampingan Modal Usaha bagi KUMKM
- h) Pengembangan Wirausaha Berdaya Saing
- i) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi KUMKM
- j) Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW-22)
- k) Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata (TKW-44)
- l) Pengembangan Industri Batik dan Rotan (TKW-33)
- m) Pengembangan Kelembagaan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias (TKW-23)
- n) Pengembangan Kelembagaan Padi Pandan Wangi (TKW-13)
- o) Pengembangan Kelembagaan Industri Perberasan dan Makanan (TKW-23)
- p) Penguatan Kelembagaan Usaha Tikar Mendong
- q) DBHCHT : Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan dan Usaha KUMKM Tembakau
- r) CLTH KKP : Pemberdayaan Masyarakat Culture : Penyusunan Kajian Potensi UMKM
- s) CLTH Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture : Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Kawasan Ciletuh
- t) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM

b. Program Pendukung, terdiri dari :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 334.200.000,-), dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang KUMKM
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur (Alokasi anggaran sebesar Rp. 917.100.000,-), dengan kegiatan :

- a) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas KUMKM
- 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.176.960.000,-), dengan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UMKM
 - b) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga KUMKM
- 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.418.267.000,-), dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM
 - b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Tenaga KUMKM
- 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.649.010.000,-), dengan kegiatan :
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM
 - b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pelatihan Tenaga KUMKM
- 6. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Alokasi anggaran sebesar Rp. 98.125.000,-), dengan kegiatan:
 - a) Pengelolaan Keuangan Dinas KUMKM
- 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Alokasi anggaran sebesar Rp. 86.700.000,-), dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD
- 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.770.225.000,-), dengan kegiatan :
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi KUMKM

3.1.6.2. Kegiatan APBN

Rencana kegiatan APBN yang akan dilaksanakan pada Satuan Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu :

a. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi.

Output yang harus dicapai didalam pelaksanaan program tersebut adalah :

- Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
- Meningkatnya daya saing UMKM
- Meningkatnya usaha baru
- Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sebesar Rp. 4.542.021.000,-.

3.2. Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi

3.2.1. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan bidang KUMKM pada tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapat total alokasi APBD sebesar Rp. 40.570.580.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.275.148.546,- (93,26%) dan realisasi fisik sebesar 99%. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.836.908.800,- (6,7 %). Data selengkapnya mengenai anggaran dan realisasi APBD TA. 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran APBD

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
				(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL APBD	56.480.475.335	56.017.527.555	52.079.014.271	92,97	99,74
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
	Proses Perencanaan dan Koordinasi Bidang KUMKM	334.200.000	334.200.000	324.825.134	97,19	100
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM	515.700.000	515.700.000	508.369.000	98,58	100
	Jabar Cyber koperasi dan Paviliun KUMKM	393.600.000	393.600.000	385.455.500	97,93	100
	Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru	7.381.920.000	7.324.253.700	7.313.153.200	99,85	100
	Pelatihan teknis substantif	340.5000.000	340.500.000	340.045.000	99,87	100
	Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna bagi Koperasi dan UMKM	639.600.000	639.600.000	630.400.000	98,56	100
	Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan bagi Pengelola Keuangan Koperasi	487.900.000	487.900.000	487.900.000	100	100
	Tatakelola dan Pendampingan modal usaha bagi KUMKM	634.000.000	634.000.000	634.000.000	100	100
	Pengembangan wirausaha berdaya saing	377.864.000	377.864.000	368.155.000	97,43	99,74
	Peningkatan Akses Pembiayaan bagi KUMKM	501.150.000	501.150.000	501.150.000	100	100
	Pengembangan industri keramik dan gerbah (TKW-22)	240.000.000	240.000.000	231.740.900	96,56	100
	Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif dan Pariwisata(TKW-44)	240.000.000	240.000.000	234.747.200	97,81	100
	Pengembangan industri Batik dan Rotan serta Makanan olahan berbahan baku lokal	240.000.000	240.000.000	239.710.450	99,88	100

1	2	3	4	5	6	7
	Tematik Kewilyahan ikan air tawar dan ikan hias	225.000.000	225.000.000	217.499.550	96,67	100
	Tematik Kewilayahan pandan wangi	225.000.000	225.000.000	206.023.975	91,57	100
	Pengembangan Industri Perberasan dan Makanan	180.000.000	180.000.000	169.975.300	94,43	100
	Penguatan Usaha Tikar Mendong	225.000.000	225.000.000	208.125.000	92,50	100
	DBHCHT Penguatan Kelembagaan KUMKM Tembakau	2.500.000.000	2.500.000.000	2.429.016.800	97,16	100
	CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture Penyusunan Kajian Potensi UMKM	226.400.000	226.400.000	226.300.000	99,96	100
	CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Kawasan Ciletuh	90.000.000	90.000.000	89.595.500	100	100
	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM (DAK)	5.000.000.000	4.861.400.000	4.708.317.500	96,85	100
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					100
	Pengembangan Usaha KUMKM	225.000.000	225.000.000	223.300.000	99,30	100
	Pengembangan Jaringan Akses Pasar KUMKM	1.357.500.000	1.357.500.000	1.348.012.500	95,59	100
	Pameran Produk KUMKM	686.200.000	686.200.000	675.159.400	98,90	100
	Penguatan Tatakelola Pengembangan Kelembagaan dan usaha Koperasi	2.483.925.000	2.483.925.000	2.467.681.300	99,35	100
	Pengembang Koperasi Skala Besar	900.000.000	900.000.000	866.840.000	96,32	100
4.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur					
	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Dinas KUMKM	917.100.000	917.100.000	737.309.500	80,40	96,73
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas KUMKM	1.402.300.000	1.402.300.000	1.313.670.459	93,69	100
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga KUMKM	774.810.000	774.810.000	724.386.076	93,49	100

1	2		3	4	5	6
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas KUMKM	6.338.700.000	5.820.967.600	4.882.161.128	83,87	99,67
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPTD Balai Pelatihan	597.300.000	597.300.000	588.978.260	98,61	100
7.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur kantor Dinas KUMKM	1.705.410.000	1.705.410.000	1.443.376.058	86,64	99,75
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai KUMKM	943.600.000	943.600.000	938.607.500	99,47	100
8.	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah					
	Pengelolaan Keuangan Dinas KUMKM	98.125.000	98.125.000	88.749.382	90,45	100
9.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD	86.700.000	86.700.000	86.015.000	90,45	100
10.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
	Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi KUMKM	1.770.225.000	1.770.225.000	1.396.788.579	78,90	90,96
11.	Belanja Tidak Langsung	15.195.746.335	15.446.947.225	13.843.474.120	89,62	100

3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN

Pada Tahun Anggaran 2016, dana APBN yang diterima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan melalui Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar **Rp 4.431.996.000,-** dimana capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.925.336.500,-** atau **88,57%**. Artinya ada sisa anggaran sebesar Rp. 506.659.500,- yang tidak terealisasi atau 11,43%. Besarnya nilai yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan untuk pelatihan yang relatif singkat.
2. Hasil negosiasi kontrak.
3. Tidak dicairkannya honor untuk petugas di Kabupaten/Kota karena kegiatan tidak dilaksanakan.

Tabel 10. Target dan Realisasi Anggaran APBN

Nama Kegiatan	Target	Realisasi	
		Keuangan	%
1. APBN			
I. Program Peningkatan daya saing KUMKM a. Perencanaan Program KementrianKUMKM b. Fasilitas Promosi c. Monitoring dan dan Evaluasi d. Operasional PLUT e. Satuan Tugas pengawas Koperasi Simpan Pinjam f. Petugas Konsultasi Lapangan (PPKL)	3.952.980.000	3.719.003.500	94.08
II. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi a. Pemantaun dan Pelaporan koperasi berkualitas	479.016.000	206.333.000	43.07
Jumlah. 2	4.431.996.000	3.925.336.500	88,57